

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya angka pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Menurut data yang di peroleh dari BPS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 sebanyak 1,79 juta jiwa atau 6,75%. Banyaknya angka pengangguran disebabkan beberapa indikator yang mempengaruhinya yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum dan produk domestik regional bruto dengan indikator tersebut dapat mengurangi angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat serta bagaimana masalah tersebut menurut perspektif Ekonomi Islam.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat dalam perspektif ekonomi islam .

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder BPS Provinsi Jawa Barat, dari jumlah populasi 27 Kabupaten/kota yang dijadikan sampel 15. Lalu dianalisis menggunakan Eviews 12.

Berdasarkan hasil uji t parsial penelitian, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran terbuka (nilai probabilitas  $0,0000 < (0,05)$ ), upah minimum negatif tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengangguran terbuka (nilai probabilitas  $0,0242 < 0,05$ ), dan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh dengan nilai probabilitas  $0,4908 > (0,05)$ . Dapat disimpulkan bahwa upah minimum negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat karena hasil uji f menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, dan produk domestik bruto secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengangguran terbuka, dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dalam perspektif ekonomi islam TPAK diharuskan mendapatkan pekerjaan berdasarkan spesialisasi dan keahlian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, tidak hanya dari sisi perorangan akan tetapi pemerintah harus andil dalam penetapan UMR yang layak. Bahwa PDRB harus didukung dengan pertumbuhan lapangan kerja, dan bahwa gaji harus memadai, tidak terlalu rendah bagi karyawan dan tidak terlalu tinggi bagi pengusaha sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Kata kunci ; *Angkatan Kerja ,Upah Minimum, PDRB, Pengangguran Ekonomi Islam.*